

Memetik Pelajaran dari Kekerasan Berbasis Gender di Afrika Selatan dan Papua Nugini

Pormadi Simbolon

pormadi.simbolon@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstrak

Kekerasan berbasis gender masih mewarnai kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia termasuk di penjara pria Afrika Selatan dan dalam masyarakat Papua Nugini. Pembelajaran dari kekerasan yang terjadi di kedua tempat tersebut membawa kita pada kesadaran pentingnya kesadaran gender berbasis hak asasi manusia (humanisasi). Budaya dan lingkungan ikut berperan dalam konstruksi gender. Artikel ini bertujuan memaparkan dua fenomena kekerasan berbasis gender berdasarkan studi kepustakaan. Penyadaran kesetaraan gender tidak mudah tetapi bukan tidak mungkin dilakukan.

Abstract

Gender-based violence still characterizes people's lives in various parts of the world, including in South African men's prisons and in Papua New Guinea society. The lessons from the violence that occurred in these two places have led us to realize the importance of gender awareness based on human rights (humanization). Culture and environment play a role in gender construction. This article aims to describe two phenomena of gender-based violence based on literature studies. Awareness of gender equality is not easy but not impossible to do.

Keywords: kekerasan, konstruksi gender, hak asasi manusia, kesetaraan

Pendahuluan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 2022 menjadi dasar untuk menjamin hak asasi manusia pada bangsa-bangsa di dunia. DUHAM ini menjadi salah satu capaian luar biasa umat manusia dalam sejarahnya. DUHAM merupakan respons atas banyaknya dehumanisasi dalam sejarah manusia terutama terkait dengan kejatuhan perang dunia II (1939-1945).

Namun capaian kemajuan umat manusia di bidang HAM ini tidak serta merta menghasilkan kemajuan dalam perlakuan humanisasi manusia. Misalnya, fenomena budaya kekerasan di penjara pria Afrika Selatan dan di tengah masyarakat Papua Nugini merupakan bukti adanya pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan dehumanisasi tersebut tampak dalam budaya kekerasan yang membentuk ketidaksetaraan gender. Maskulinitas mendominasi feminitas. Maskulinitas dicapai lewat penundukan feminitas dengan kekerasan. Tulisan ini mencoba memaparkan dua fenomena kekerasan berbasis konstruksi gender di penjara pria Afrika Selatan dan Provinsi bagian Barat Papua Nugini. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penulis akan membahas landasan teoritis, memaparkan fenomena kekerasan di penjara pria Afrika Selatan dan kekerasan gender pada masyarakat Papua Nugini, menunjukkan kesamaan dan perbedaannya, memberikan analisis, dilanjutkan dengan refleksi dan penutup singkat.

Pembahasan

Landasan Teoritis

Teori dominasi maskulin Pierre Bourdieu erat kaitannya struktur kekuasaan. Dominasi maskulin terbentuk dalam struktur kekuasaan tertentu. Struktur kekuasaan meliputi modal, kelas, habitus, ranah, serta kekerasan dan kekuasaan. Kekerasan merupakan hasil dari adanya kekuasaan. Media untuk menunjukkan adanya kekerasan dan kekuasaan adalah modal simbolik. Adanya modal simbolik tersebut menghasilkan kekerasan simbolik (Martono, 2012). Dominasi maskulin tidak terjadi begitu saja melainkan dilatarbelakangi oleh kepercayaan-kepercayaan yang wajar dalam masyarakat tertentu. Dominasi maskulin tersebut terungkap dalam praktik kekuasaan dalam berbagai bentuk.

Pada hakekatnya kekerasan terbentuk melalui sebuah proses yang tidak cepat, tapi membutuhkan waktu yang lama. Kluseman menunjukkan bahwa perilaku kekerasan merupakan sebuah proses yang terbentuk oleh dinamika emosi dan situasi lo-

kal seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica (Kluseman, 2012: 468). Dalam konteks pandangan Kluseman, kekerasan di penjara pria Afrika Selatan dan di Papua Nugini terjadi melalui proses yang lama. Kekerasan tersebut menjadi budaya narapidana di dalam penjara dan kebiasaan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat di Papua Nugini. Bagaimana fenomena kekerasan terjadi pada kedua negara tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut ini.

Kekerasan di Afrika Selatan

Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di penjara pria Afrika Selatan ikut ambil bagian dalam konstruksi gender. Budaya narapidana di penjara mengilhami kekerasan dan konstruksi identitas gender. Para pelaku kekerasan seksual sangat dihargai, sementara para korban distigmatisasi dan dirundung rasa malu yang sangat mendalam (Gear, 2010: 316). Itu berarti penjara pria Afrika Selatan menjadi alat legitimasi dan tempat peningkatan gagasan kekerasan brutal maskulinitas dan seksualitas terhadap feminitas. Penjara menjadi ruang demonstrasi kejantanan atau kelaki-lakian yang ditunjukkan dengan memperkosa sesama pria atau sejenis. Meskipun ada upaya untuk mengatasi kekerasan tersebut, kekerasan seksual pada teman sejenis tetap kuat dan tidak berubah.

Implementasi konkrit dari kekerasan tersebut tampak dalam memperlakukan teman sejenis sebagai "wanita" atau "istri". Sebagian laki-laki teman sejenis tidak diakui sebagai laki-laki, namun dipandang sebagai 'perempuan' atau 'istri'. Para pelakunya adalah mereka yang paling kuat, berkuasa dan berpengaruh. Ada relasi kuasa atau dominasi maskulin dari mereka yang kuat dalam hubungannya dengan mereka yang lemah. Ada budaya hirarki dan praktik budaya yang mengaburkan kekerasan seksual sehingga tidak terlihat. Itulah budaya populasi penjara pria dimana para 'perempuan' disamakan dan dianggap sebagai objek seks serta pengurus rumah tangga. Relasi mereka dipandang sebagai relasi 'perkawinan' dalam jangka panjang (Gear, 2010:317).

'Perkawinan' dan hubungan gender ini sudah terbentuk dalam cara kerja geng penjara dan budaya narapidana pada umumnya. Geng digambarkan memiliki peringkat maskulin dan feminine terhadap para anggotanya. Para anggota baru atau pendatang baru ke dalam penjara bisa dilihat sebagai laki-laki atau perempuan. Hal itu tergantung dari sifat feminin yang dominan atau tidak. Pendatang baru kerap kali rentan karena ketidaktahuan mereka akan aturan tidak tertulis penjara membuat mereka mudah ditipu dan dimanipulasi oleh narapidana lain. Yang seringkali menjadi korban adalah tah-

anan miskin, lemah secara fisik, atau 'cantik' secara fisik. Mereka yang memiliki ketakutan dan keengganan melawan dengan kekerasan kemungkinan besar mereka menjadi mangsa para pelaku.

Kekerasan Berkesinambungan

Hubungan seksual sesama pria lewat penetrasi dipahami sebagai upaya membentuk identitas feminin. Hubungan tersebut mendukung maskulinitas pelaku. Dalam sistem sosial ini, gender digabungkan dengan peran seks yang digambarkan secara ketat. Pemeriksaan mempunyai fungsi sosial untuk membentuk kembali hubungan heteroseksual dalam lingkungan penjara yang semuanya terdiri dari laki-laki.

Di penjara pria Afrika Selatan, dimana semua narapidana adalah laki-laki, persyaratan untuk lawan jenis kelamin tetap diterjemahkan dalam peran seks oposisi, di mana 'laki-laki' sebagai penetrator eksklusif dan 'perempuan' sebagai penerima secara eksklusif. Dalam budaya mereka ini, tidak ada yang namanya penyimpangan. Faktanya, salah satu penyimpangan yang ada adalah praktik konsensual, dimana para peserta bergiliran melakukan penetrasi dengan mereka yang dipenetrasi secara seksual. Hal ini mengacaukan persamaan gender dengan peran seks yang tetap.

Korban Dipersalahkan

Di tengah keadaan demikian, ada berbagai wacana yang melegitimasi relasi kuasa yang dominan. Seorang perempuan korban di luar penjara kerap dipersalahkan atas apa yang menimpa mereka. Dalam penjara, tidak ada orang yang cukup jantan dan berani untuk mencegahnya, malahan muncul persepsi bahwa pemerkosaan adalah kesalahan korban dan pelaku tidak melakukan kesalahan apapun (Gear, 2010: 318).

Banyak kekerasan seksual dalam penjara disebabkan pandangan yang mencontoh pola relasi heteroseksual dominan di luar penjara sebagai pembedannya. Narapidana kerap menggunakan hubungan di luar penjara untuk menggambarkan hubungan mereka di dalam penjara, seperti "istri di penjara diperlakukan seperti wanita di luar" dan istri tidak mungkin diperkosa suaminya. Itulah persepsi mereka.

Makna Maskulinitas

Yang paling tampak dalam penelitian Gear (2010: 318) adalah gagasan tentang kejantanan (*manhood*) dalam budaya narapidana di penjara pria. Kejantanan dijaminasikan sebagai keunggulan dibandingkan dan keadaan kewanitaan sebagai yang lemah

dan dilabelkan pada korban perkosaan. Keterampilan menggunakan kekerasan dipandang sebagai bagian integral dari maskulinitas. Jika 'perempuan' ingin dipandang sebagai 'pria', maka ia harus tampil melakukan kekerasan sebagai bukti kelayakan memiliki 'kejantanan'. Bahkan kejantanan dipersepsikan sebagai pria yang memiliki 'wanita' atau 'istri'.

Konseptualisasi kekerasan seksual oleh 'pria' atau 'maskulin' berkaitan erat dengan peran berbasis gender di penjara, demikian pendapat Antony Whitehead (2005). Whitehead memandang cara-cara kekerasan dapat berfungsi dalam interaksi pria satu sama lain, terutama dalam konteks 'kecemasan maskulin' merupakan situasi dimana pria takut kehilangan kejantanan (maskulinitas) mereka. Ketakutan semacam ini tentu saja dipicu oleh adanya perampasan identitas oleh yang lain, dan penjara dengan penghuni yang homogen memberikan sedikit kesempatan dalam mengekspresikan diri mereka. Namun kekerasan dapat digunakan untuk menegaskan kejantannya, bahkan pertarungan antara pria dengan pria sebagai saingan yang ketat. Selain itu, kekerasan dapat berfungsi "mengeluarkan korban dari kategori laki-laki" sebagai tidak layak di sana, menjadikannya sebagai non-laki-laki, dengan demikian menegaskan kejantanan pelaku. Whitehead menyebut kekerasan tersebut sebagai kekerasan eksklusif (sebagaimana dikutip Gear, 2010: 318).

Hubungan seksual dengan paksa dengan sesama laki-laki merupakan bentuk kekerasan eksklusif: hal itu dipandang sebagai bentuk penghilangan kejantanan korban, karena gagal memenuhi persyaratan maskulinitas yang ideal. Kejantanan sejati dalam pandangan budaya narapidana adalah bahwa pria yang berhasil melawan penyerang, dan karena itu tidak dapat diperkosa. Pandangan ini meresap dalam persepsi masyarakat umum. Stigma demaskulinasi membuat banyak korban menanggung malu dengan diam-diam (sebagaimana Gear mengutip Rumney dan Morgan-Taylor 2004, Gear, 2010: 318-319).

Identitas gender yang dihasilkan dari kekerasan seksual di penjara menegaskan bahwa para pelaku semakin kuat dan saling mendukung, sementara korban hanya bisa diam tak berdaya. Pola seperti ini berkontribusi membangun konstruksi gender dan seksualitas yang tidak sehat, bahkan mengacaukan definisi homoseksualitas dan kekerasan seksual.

Kekhawatiran

Di Afrika Selatan, upaya untuk mengatasi kekerasan seksual, Kesehatan dan hak narapidana cenderung kontraproduktif dan memicu protes dalam menggemakan budaya para narapidana ini.

Dua hal tabu - homoseksualitas dan pemerkosaan laki-laki - maknanya diaduk dan dikacaukan. Seksualitas dan kekerasan menyatu. Keinginan akan sesama jenis terus menguat, para korban pemerkosaan laki-laki tidak diakui keberadaannya.

Publikasi gambaran pemerkosaan sesama jenis di penjara, yang ditafsirkan sebagai homoseksualitas menimbulkan kegemparan di masyarakat. Homoseksualitas sering digunakan untuk merujuk pada semua hubungan seksual di penjara, sehingga narapidana dan staf penjara menjadi takut dengan homoseksualitas, yang bermakna sebenarnya mereka bahwa takut dipaksa berhubungan seks.

Di Afrika Selatan 'sodomi' mengacu pada penetrasi anal dan dipandang bukan sebagai pelanggaran. Kesalahan persepsi demikian kemungkinan berasal dari kriminalisasi penetrasi sesama jenis laki-laki sebelum tahun 1998. Bahkan sampai akhir tahun 2007, regulasi Afrika Selatan gagal untuk mengakui bahwa pria diperkosa sebagai kejahatan (Gear, 2010: 319).

Situasi-situasi seperti ini berkontribusi langsung pada kebingungan yang pada gilirannya melanggengkan gagasan kriminal tentang hasrat sesama jenis, dan mengaburkan makna kekerasan, menggabungkan hubungan seksual secara paksa dengan makna homoseksualitas. Salah satu perwujudannya adalah seks secara paksa kerap kali disalahartikan dan dianggap sebagai suka sama suka.

Fenomena Budaya Kekerasan di Papua Nugini

Philips Gibbs melakukan penelitian lewat studi kasus pada Kelompok/Gerakan Pria (39 orang dari 12 Paroki) di Keuskupan Daru-Kiunga, Provinsi Western Papua Nugini. Kelompok Pria ini terbentuk atas inisiatif para pria dalam rangka merefleksikan identitas dan peran mereka dalam menghadapi masalah terutama kemajuan masyarakat yang pesat dan dampak industri pertambangan dan penebangan kayu di Papua Nugini (Gibbs, 2010: 130).

Kelompok Pria tersebut melakukan pertemuan-pertemuan selama bertahun-tahun di Kiunga, mulai dari tahun 2006 hingga 2009. Mereka membahas dan merefleksikan berbagai tema antara lain, identitas dan peran sebagai pria (maskulinitas), kekerasan, bahasa dan nilai-nilai berbasis hak, ketidaksetaraan gender, ketimpangan kekuasaan antara pria dan wanita, 'suasana batin' pria, dampak lingkungan-sosial industri pertambangan, penyebaran HIV-AIDS dan sihir atau *sanguma*. Pada tahun 2012, kelompok pria melalui tim inti berjumlah 12 orang bertemu bersama di Kiunga. Mereka Kembali berdiskusi tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan hak asasi manusia menjadi program kesadaran laki-laki terkait peran dan

tanggung jawab mereka di tengah masyarakat.

Mekanisme pertemuan lokakarya dilaksanakan dalam bentuk presentasi, diskusi bebas, dan dramatisasi. Fasilitator termasuk Gibbs di dalamnya, memberikan pengantar dan pengenalan singkat tentang tema-tema yang akan dibahas, kemudian peserta diajak berdiskusi dan sharing pengalaman secara kelompok. Hasil diskusi diplenokan baik secara lisan, tertulis, grafik maupun dalam bentuk drama. Melalui pertemuan pleno ini, para peserta memunculkan pertanyaan dan masalah yang menjadi bahan diskusi dalam kelompok besar. Fasilitator membuat catatan rinci dari diskusi dan memberikan umpan balik. Setiap malam peserta melakukan rapat evaluasi untuk mencari cara terbaik untuk melanjutkan lokakarya di hari berikutnya. Kisah-kisah pertemuan ini direkam dan menjadi bahan penting.

Penyadaran Kesetaraan Gender

Gibbs melakukan penelitian partisipatif lewat studi kasus dalam sebuah kelompok diskusi aktivis pria berbasis lembaga Gereja Katolik di Provinsi Barat Papua Nugini. Kelompok pria tersebut melakukan berbagai pertemuan untuk mendalami berbagai tema yang berkaitan dengan masalah pria seturut konteks budaya masyarakat di Papua Nugini.

Dari catatan Gibbs, pertemuan pleno lokakarya selama bertahun-tahun tersebut pelan-pelan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan kesadaran, dan membentuk kelompok Gerakan Pria. Ditemukan ada berbagai tema penting terkait hubungan laki-laki dan perempuan, yaitu: (1) kekerasan fisik dan verbal; (2) peran dan tugas tidak eksklusif milik laki-laki; (3) kesetaraan dalam perbedaan peran dan tugas, dan (4) terjadinya pergeseran dari model kontrol hierarkis ke kontrol egaliter dalam masyarakat.

Menurut laporan Richard Eves dari *Caritas Australia* seperti dikutip Gibbs (2016: 129) mencatat bahwa banyak pria di Papua Nugini melihat kejantanan atau maskulinitas mereka tergantung pada kontrol mereka atas perempuan dan bahwa mereka menggunakan kekerasan dalam mencapainya. Dalam diskusi kelompok tersebut ditemukan bahwa ada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Tidak jarang seorang suami bisa memukuli istrinya yang tidak mau dikendalikan. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk pertengkaran karena ekonomi, pelatihan disiplin anak, kebiasaan minum alkohol dan kecurigaan hubungan suami-istri.

Selain tema kekerasan tersebut, tema lain yang dibahas adalah soal peran dan tugas antara laki-laki

dan perempuan. Hal ini menyangkut kesetaraan gender dan kesetaraan dalam perbedaan tugas dan peran serta pentingnya pola relasi kuasa dari hierarkis menuju relasi kontrol yang egaliter dalam masyarakat. Dalam berbagai pertemuan yang berlangsung bertahun-tahun tersebut, kelompok pria mengalami perubahan signifikan secara pelan-pelan yaitu munculnya kesadaran baru atas paradigma para pria yang dihidupi selama ini yaitu adanya kesadaran kesetaraan gender dan terciptanya hidup harmoni suami-istri.

Kesadaran akan kesetaraan peran dan tugas laki-laki tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses refleksi tematis. Misalnya, di masa lalu, anak laki-laki dipisahkan dari ibu dan saudara perempuannya dengan tujuan agar tidak terjadi kontak yang tidak pantas yang mengganggu pertumbuhan mereka. Tradisi lainnya, anak laki-laki akan pergi untuk waktu yang lama ke dalam hutan untuk belajar merdeka atau mandiri. Nilai kemandirian ini dicapai dengan tinggal berbulan-bulan di hutan. Lalu bagaimana pandangan tradisional ini diterjemahkan dengan bahasa di era sekarang?

Konsep seperti ini harus diterjemahkan dengan ungkapan yang aktual dan relevan. Ditemukan ada tiga peran maskulinitas yang relevan, yaitu pria sebagai penyedia (*provider*), pelindung (*protector*), dan pemimpin (*leader*). Sebagai penyedia, pria bertugas menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi keluarga dan komunitasnya. Sebagai pelindung, pria bertugas melindungi keluarga dan kelompoknya. Sebagai pemimpin, pria mengambil keputusan yang bijaksana dan membimbing keluarganya agar tidak terombang-ambing tanpa kemudi di tengah lautan. Tiga peran laki-laki ini sangat cocok dengan pemahaman tradisional sebagai pemburu, pelindung dalam peperangan dan pemimpin di desa.

Dalam salah satu lokakarya juga muncul kesadaran bahwa orang dapat mengubah budaya yang diwariskan. Kebudayaan itu bukanlah sesuatu seperti batu yang tidak dapat diubah. Para leluhur juga adalah manusia biasa. Untuk itu, kebudayaan yang baik dapat dilestarikan, sedangkan kebudayaan yang tidak relevan dapat dibuang seperti praktik sihir atau *sanguma*. Peran sebagai penyedia, pelindung dan pemimpin sangat tepat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda.

Ketiga peran laki-laki tersebut di atas tidak eksklusif dimiliki laki-laki. Peran tersebut juga dimiliki perempuan dengan wacana dan pengungkapan yang berbeda-beda. Sebagai penyedia, perempuan menyediakan makanan untuk anak-anak dan suami. Sebagai pelindung, wanita membela dan melindungi suami ketika dalam masalah, misalnya di sidang pengadilan. Sebagai pemimpin, perempuan

melatih anak-anak agar berdisiplin dalam waktu. Anak-anak diberi batasan dalam bermain dengan teman-teman sebayanya. Inilah sebuah kesetaraan dalam perbedaan peran dan tugas. Pergeseran dari model kontrol hierarkis ke kontrol egaliter juga menjadi kesadaran para pria sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan bersama. Uskup Côté mengakui bahwa Gereja Katolik cenderung patriarkal, kurang mengakui feminin. Gereja di keuskupannya sedang bergumul mencari solusi agar pria dan wanita berpartisipasi bersama dalam komunitas dan kerja tim.

Perpindahan pemahaman tentang model kontrol dari hierarkis ke egaliter lebih dipengaruhi oleh ajaran kristiani. Sekurang-kurangnya perubahan pemahaman itu diilhami ayat Kitab Suci tentang penciptaan. Pertama, Allah menciptakan pria dan wanita secitra dengan Allah. "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka (Kej. 1:27). Para pria melihat bahwa pria dan wanita sama di hadapan Allah, meskipun berbeda-beda secara fisik.

Kedua, perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Para pria dalam lokakarya tersebut menafsirkan bahwa perempuan dibentuk dari bagian tulang rusuk pria (dekat di hatinya) untuk menjadi pendamping sejajar di sisinya. Pemahaman ini membawa kesadaran bahwa pria dan wanita adalah setara dan sejajar, tidak lagi laki-laki mensubordinasi perempuan, tetapi dalam posisi berdampingan.

Dukungan Otoritas

Inisiatif dan program gerakan pria ini sangat didukung oleh Uskup Gilles Côté, pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Daru-Kiunga, Papua Nugini. Uskup Keuskupan Daru-Kiunga ini menjadi fasilitator, dan Gibbs menjadi penasehat dalam program Kelompok Pria ini. Uskup Gilles Côté berharap Kelompok Pria atau Papa Grup ini menjadi sebuah gerakan yang membuat para pria dapat menghadapi dunia modern dan termasuk dapat membangun relasi yang sehat dengan istri dan keluarganya.

Gerakan pria ini merasakan bahwa kesadaran akan hak asasi manusia dalam perpektif gender adalah hal yang positif. Kesadaran hak asasi seperti ini lebih merupakan pengaruh ajaran kristiani, bukan seperti dipahami berdasarkan pandangan sekuler seperti di Amerika Serikat atau di Australia. Tim inti gerakan ini berencana melanjutkan program penyadaran ini dalam komunitas basis kristiani melalui tiga level strategi, yaitu: (1) penyadaran, (2) pelatihan keterampilan, dan (3) perubahan organisasi.

Untuk program penyadaran, kelompok akan menerbitkan buletin sebagai wadah penyampaian seka-

ligus penyadaran ide atau gagasan-gagasan positif. Pelatihan keterampilan diwujudkan dalam bidang komunikasi efektif, pendidikan seks, pembekalan perkawinan, penanganan alkohol dan narkoba. Perubahan organisasi dimaksudkan penyesuaian (integrasi) dengan rencana pastoral atau program kerja keuskupan berbasis komunitas basis kristiani.

Kesamaan Pola Kekerasan

Dari uraian di atas baik di penjara pria Afrika Selatan maupun di tengah masyarakat Papua Nugini terdapat kesamaan yaitu pertama, perilaku kekerasan memiliki pola yang sama yaitu kekerasan yang terjadi dalam konteks relasi kuasa atau relasi kontrol. Fenomena kekerasan di penjara pria Afrika Selatan dan masyarakat pria di Papua Nugini terjadi karena pandangan bahwa pria sejati adalah pria yang memiliki kuasa dan kendali atas perempuan atau istri.

Kesamaan kedua adalah adanya konstruksi gender berbasis kekerasan. Peran pria dan wanita lebih dipandang dari sisi kacamata pria dari pada dari sisi hakekat peran dan tugas yang saling melengkapi keduanya. Padahal peran tersebut merupakan dua peran komplementer. Kesamaan ketiga, kekerasan yang dipraktikkan baik penjara pria di Afrika Selatan maupun di Papua Nugini ikut membangun ketidaksetaraan gender. Konstruksi gender lewat budaya kekerasan ini menstigmatisasi perempuan sebagai yang hina dan objek seks belaka.

Perbedaan Pola Kekerasan

Selain kesamaan, perbedaan fenomena kekerasan dalam dua negara yang berbeda tersebut terlihat pada pemahaman yang kabur atas definisi homoseksualitas dan kekerasan. Fenomena kekerasan di penjara Afrika Selatan dilatarbelakangi paradigma dimana makna hubungan seksualitas secara paksa dan homoseksualitas disamaratakan, padahal itu merupakan dua hal yang berbeda. Bahkan negara melalui regulasi melegitimasi kekerasan seksual melalui pemerkosaan pria, sebagai bukan sebuah pelanggaran.

Tidak demikian halnya dengan fenomena kekerasan di Papua Nugini. Kekerasan di Papua Nugini sangat jelas dalam hal pembedaan makna kekerasan dalam hubungan suami-istri dalam keluarga. Perbedaan tersebut melahirkan perbedaan berikutnya yaitu bahwa upaya penyadaran atas keburukan dampak kekerasan di kedua negara memiliki kesulitan masing-masing. Penyadaran solutif kekerasan di penjara pria Afrika Selatan melahirkan kesulitan akibat perbedaan paradigma, malahan yang timbul adalah resistensi dari publik. Sementara penyadaran dampak buruk kekerasan di Papua Nugini lebih mudah karena didukung oleh lembaga otoritas, da-

lam hal ini lembaga agama.

Bersifat Kasuistik

Terwujudnya kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia merupakan cita-cita dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Pria dan perempuan memiliki hak asasi yang sama untuk diakui dan dihargai. Posisi laki-laki dan perempuan bukan lagi relasi dominasi atau ketundukan perempuan kepada laki-laki, tetapi dalam kesetaraan gender. Identitas maskulinitas yang masih dominan dalam berbagai budaya masyarakat seperti di penjara pria Afrika Selatan dan Papua Nugini tidak gampang diubah atau dikonstruksi. Penyadaran untuk menciptakan kesadaran gender dan mengurangi kekerasan harus dilihat secara kasuistik.

Fenomena kekerasan di penjara Afrika Selatan merupakan kasus unik karena sudah terbentuk sebagai budaya narapidana dan dipengaruhi latar belakang sejarahnya. Perbedaan antara kekerasan seksualitas dan homoseksualitas yang kabur melahirkan kesulitan tersendiri, sehingga kekerasan tetap langgeng. Kesulitan ini diperkuat oleh legitimasi negara. Sementara dalam studi kasus (Gibbs, 2016: 127-158) yang ditulis Philip Gibbs, sosiolog, dan rohaniwan SVD yang berkarya di Keuskupan Daru-Kiunga, Papua Nugini mencatat bahwa penyadaran atas kesadaran gender dan pengurangan tindakan kekerasan dapat dilakukan secara pelan-pelan. Kemudahan penyadaran ini terwujud karena adanya dukungan otoritas dalam hal ini lembaga berbasis agama.

Maskulinitas dalam Konteks Budaya

Di Afrika Selatan, budaya kekerasan terhadap sesama jenis di penjara pria lumrah terjadi. Pelaku kekerasan merasa lebih maskulin jika dapat menunjukkan kejantananannya dengan memperkosa laki-laki sesama jenis. Kejantananannya dicapai melalui kekerasan seksual. Korban perkosaannya dijadikan sebagai 'istri' atau 'teman perempuan'nya layaknya hubungan suami istri di luar penjara (Gear, 2010: 317). Menurut Gear, gagasan kuat tentang maskulinitas dan seksualitas terkait erat dengan sejarah Afrika Selatan yang berjuang melawan kaum apartheid (Gear, 2010: 316). Pemuda Afrika berjuang dengan kekerasan melawan perlakuan diskriminasi kulit putih.

Dalam kebudayaan masyarakat Papua Nugini terdapat pandangan yang sama. Maskulinitas pria bergantung pada kemampuan pria mengendalikan dan menundukkan kaum perempuan. Maskulinitas tercapai bila penundukan perempuan oleh laki-laki berhasil. Kejantanan tersebut dicapai lewat kekerasan baik fisik maupun verbal. Kekerasan-kekerasan ini lumrah terjadi dalam menyelesaikan

konflik dan mengungkapkan kemarahan dalam sebagian besar masyarakat Papua Nugini.

Maskulinitas dan kekerasan

Mengapa maskulinitas dikaitkan dengan kekerasan? Maskulinitas hadir dan terbentuk dalam kebudayaan. Dari literatur yang ada, kekerasan menjadi lumrah karena praktik atau habitus tercipta dengan sendirinya di penjara pria Afrika dan Provinsi Western, Papua Nugini. Kejantanan dimaknai dan mewujudkan nyata dalam dominasi atau penundukan kaum perempuan oleh laki-laki, yang jamak terjadi lewat jalan kekerasan. Dari penelitian Gear (2010: 317), penetrasi seksual dipaksakan kepada korbannya yang selanjutnya dipandang sebagai 'istri'-nya untuk menunjukkan dan menguatkan identitas maskulinitas pelaku. Dalam hal ini, gender digabungkan dengan peran seks yang direalisasikan melalui kekerasan seksual.

Pelajaran Berharga

Fenomena kekerasan di penjara pria Afrika Selatan dan di Papua Nugini merupakan fenomena yang bisa saja terjadi di Indonesia. Kedua fenomena kekerasan dalam dua konteks negara yang berbeda tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa budaya kekerasan terbentuk karena didukung oleh lingkungan sosial dan otoritas yang ada. Gear berpendapat bahwa kekerasan di penjara pria Afrika Selatan merupakan cengkeraman represif-konstruktif maskulinitas-kejantanan dan seksualitas yang didukung oleh otoritas melalui regulasi. Dominasi maskulinitas menjadi faktor timbulnya kekerasan demi menunjukkan kejantanan (*manhood*) para pelaku.

Gibbs mengkaji bahwa perubahan pandangan identitas maskulinitas berbasis kekerasan di Papua Nugini dapat dicapai melalui penyadaran dalam sebuah studi kasus. Perubahan dilihat dalam tiga kerangka: kesadaran pria atas peran wanita; ajaran kristiani membantu konsep kesetaraan; dan eksistensi model kontrol hierarkis-egaliter. Fenomena budaya kekerasan merupakan fenomena umum di berbagai masyarakat dunia. Namun, dampak kekerasan dapat dikurangi lewat penyadaran dan penetapan regulasi yang didukung oleh otoritas seperti negara atau lembaga agama.

Budaya kekerasan berbasis gender seperti di penjara pria mengakibatkan 'perempuan' atau 'istri' dalam posisi rendah dalam peran dan tugasnya. Feminitas dilegitimasi para pelaku sebagai obyek seksual atau obyek yang harus tunduk pada maskulinitas. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia Kesetaraan gender yang dibangun lewat studi kasus dalam masyarakat Papua Nugini merupakan hal menarik. Pola penyadaran tersebut

dapat menjadi salah satu bentuk dalam membangun kesetaraan gender di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengupayakan perwujudan kesetaraan gender karena ia akan memperkuat kapasitas negara dalam mengurangi kemiskinan dan mengefektifkan pelayanannya kepada masyarakat agar sejahtera adil dan makmur (bdk. *sdgs.bappenas.go.id*).

Penutup

Pandangan Pierre Bordieu tentang dominasi maskulin sangat terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan diungkapkan para pelaku dalam bentuk kekerasan. Korban tidak berdaya, hanya bisa tunduk. Ketimpangan kekuasaan ini mengakibatkan dehumanisasi atau pelanggaran hak asasi manusia.

Hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 1 DUHAM, menegaskan bahwa semua orang baik pria maupun wanita dilahirkan merdeka dan memiliki hak dan martabat yang sama. Kekerasan berbasis gender pada kedua negara yang disebutkan di atas seyogyanya tidak terjadi lagi. Pelajaran dari fenomena budaya kekerasan pada kedua negara tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Penjaminan hak asasi manusia di Indonesia seharusnya lebih baik karena didukung oleh negara dan berbagai ajaran agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui penjaminan hak asasi manusia khususnya perwujudan kesetaraan gender, pemerintah akan dapat mewujudkan Indonesia maju dan tangguh.

Referensi

- Gear, S. 2010. "Brutal Logic. Violence, Sexuality and macho myth in South Africa men's prisons and beyond" in Peter Aggleton & Richard Parker (eds) Routledge Handbook of Sexuality, Health and Rights, Routledge, London & New York, pp. 316-323.
- Gibbs, P. 2016. "Men's Matter: Changing Masculine Identities in Papua New Guinea," in Aletta Biersack, Margaret Jolly & Martha Macintyre, Gender Violence & Human Rights Seeking Justice In Fiji, Papua New Guinea & Vanuatu, Canberra, ANU Press, pp. 127- 158.
- Kluseman, Stefan. 2012. "Massacres as process: A micro-sociological theory of internal patterns of mass atrocities," European Journal of Criminology, Vol. 9(5) 468 -480.
- Martono, M. (2012). *Kekerasan simbolik di sekolah: Sebuah ide sosiologi pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Whitehead, A. (2005) 'Man to Man Violence', Howard Journal, 44 (4): 411-22.
- Bappenas, 2022, pada <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/> diunduh 19 Desember 2022 pukul 22.15 WIB.